

Nomor : B/ 971 /AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2022

6 Desember 2022

Yth. **Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang**
di
Tanjungpinang

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Kota Tanjungpinang, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi tahun lalu untuk perbaikan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kota Tanjungpinang. Tindak lanjut yang sudah dilakukan antara lain:

- Melakukan reviu atas terhadap dokumen perencanaan RPJMD, namun perubahan tersebut belum memperoleh persetujuan dari DPRD;
- Melalui TAPD, Kota Tanjungpinang sedang melaksanakan refocusing program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memiliki kontribusi dalam pencapaian kinerja pemerintahan;
- Pemkot Tanjungpinang juga mendorong pelaksanaan dialog kinerja dan meluncurkan aplikasi SIAP untuk mendukung pengadministrasian absensi pegawai.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa nilai sebesar **73,27** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**, yaitu implementasi **AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,56
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,28
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,33
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,10
	Nilai Hasil Evaluasi	100	73,27
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Hasil evaluasi tahun 2022 **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kota Tanjungpinang tahun 2022 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyusun dokumen perencanaan yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja serta dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat Pemda maupun pada tingkat PD. Reviu yang dilakukan secara berkala atas dokumen perencanaan menjadikan sasaran dan indikator pada Perjanjian Kinerja lebih berorientasi hasil. Pemkot Tanjungpinang juga sudah menjabarkan kinerja sampai ke level individu. Pemkot Tanjungpinang juga sudah menyusun Rencana Aksi yang dibuat secara triwulanan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Masih terdapat rumusan sasaran strategis serta indikator yang belum berorientasi hasil di Perangkat Daerah (PD) dan kurang merepresentasikan isu strategis dari PD, antara lain pada Dinas P3APM berupa sasaran meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak dengan Indikator Persentase realisasi sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah dan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa sasaran strategis meningkatnya SDM Pengelola Perpustakaan dengan indikator persentase SDM tenaga teknis, fungsional dan pengelola perpustakaan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- Penjabaran kinerja di PD belum menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja, sehingga terjadi ketidakselarasan penjabaran kinerja organisasi dengan kinerja individu;
- Penetapan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis, dan tidak sepenuhnya relevan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah;
- Terdapat beberapa penetapan target Perjanjian Kinerja PD yang masih belum sesuai seperti indikator rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dengan target 100% pada Dinas P3APM dan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Pemustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan target 102,78%;
- Pemkot Tanjungpinang beserta PD belum menyampaikan beberapa dokumen terbaru terkait implementasi SAKIP melalui www.esr.menpan.go.id sehingga tidak diketahui perkembangan kondisi perencanaan.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan pengukuran secara berkala atas capaian kinerja kepada seluruh perangkat daerah dan mengembangkan aplikasi SIAP untuk pengukuran kinerja individu. Pemkot Tanjungpinang juga mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam proses penetapan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Permenpan 8 Tahun 2021. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Mekanisme pengumpulan data dan juga penanggung jawab kinerja belum dijabarkan dalam definisi operasional yang jelas;
- Aplikasi SIAP masih tahap ujicoba terhadap beberapa PD dan belum fokus pada ukuran capaian kinerja individu;
- Pengukuran kinerja tingkat PD yang dilakukan belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 Pemerintah Daerah maupun Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan serta sudah dipublikasi secara umum melalui *website* pemda. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja sebagian besar PD belum menyajikan analisis yang memadai atas faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan yang relevan terhadap capaian kinerja;
- Laporan Kinerja belum menyajikan permasalahan atau kendala yang dihadapi dengan strategi yang harus dilakukan untuk perbaikan perencanaan kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja level kota.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kota Tanjungpinang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada 31 PD dengan hasil 3 PD memperoleh predikat A, 23 PD memperoleh Predikat BB dan 5 PD dengan predikat B. Pemkot Tanjungpinang

juga telah menyusun pedoman evaluasi AKIP yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota No 15 tahun 2022.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Rekomendasi hasil evaluasi masih belum bisa mendorong kualitas implementasi SAKIP di PD;
- Belum ada kebijakan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi, yang menyebabkan hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh PD;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum terimplementasi secara maksimal di level PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan seluruh dokumen terkait dengan implementasi kinerja yang terbaru melalui *esr.menpan.go.id* sebagai dasar pelaksanaan evaluasi;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan pada level Pemda maupun PD, agar tujuan/sasaran strategis berorientasi pada hasil dan menyelaraskan indikator-indikator kinerja pada dokumen perencanaan;
- 3) Menyempurnakan penjabaran kinerja mulai dari level Wali Kota sampai level individu sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi;
- 4) Mengoptimalkan reviu terhadap program dan kegiatan agar seluruhnya mendukung tercapainya sasaran strategis dan prioritas pembangunan daerah;
- 5) Melakukan reviu terhadap target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, agar lebih valid dan relevan sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja;
- 6) Menyusun pedoman mekanisme pengumpulan data kinerja, agar data kinerja yang disajikan menjadi valid dan diketahui penanggung jawabnya;
- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi kinerja dan juga SIAP sebagai alat monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala dan menggunakan hasilnya sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
- 8) Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja;

- 9) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja kepada seluruh PD, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh seluruh PD dalam upaya mencapai target kinerja kota;
- 10) Mendorong PD secara aktif melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal dan melakukan monev secara berkala dan hasilnya dijadikan dasar pemberian *rewards* dan *punishment* di internal PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kota Tanjungpinang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kota Tanjungpinang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kepulauan Riau;
4. Wali Kota Tanjungpinang.